



Pemberdayaan Temporer: Kritik Sosiologis Terhadap Program Anugerah Desa Wisata Indonesia di Kabupaten Gowa

Nur Riswandy Marsuki

Universitas Muhammadiyah Makassar

Correspondence author: riswandymarsuki@unismuh.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Rural Tourism,
Commodification,
Empowerment,
Sustainability,
Community-Based
Tourism

How to cite:

Marsuki, N, I. 2026.
Pemberdayaan Temporer:
Kritik Sosiologis Terhadap
Program Anugerah Desa
Wisata Indonesia di
Kabupaten Gowa. *Emik*,
9(1), 47-61

Article info:

Diterima 2026-05-06
Disetujui 2026-06-19
Dipublikasi 2026-06-22

ABSTRACT

The development of tourist villages in recent years has become one of the government's main strategies in encouraging locally based economic growth while strengthening the independence of village communities. Unlike previous research, which generally focused on tourism potential, economic impact, community participation, and the success of government programs in developing tourism villages, post-program sustainability and the commodification of empowerment in the context of tourism villages are still relatively limited in the existing literatures, this study deals with post-program dynamics, particularly regarding the sustainability of community empowerment following the implementation of the Indonesian Tourism Village Award program, initiated by the Ministry of Tourism and Creative Economy since 2021. It aims to uncover the discrepancy between program objectives and empirical realities on the ground, where empowerment tends to be temporary and unsustainable.

This qualitative research with a case study approach was conducted in Manuju Tourism Village, Gowa Regency. Data were collected through in-depth interview and field observation. There were 11 informants participated in this study, consisting of a village head, village secretary, Pokdarwis chairman, Karang Taruna members, social activists, business actors (MSMEs), two waterfall managers, and three community members.

The findings indicate that, following the program's completion, empowerment activities stagnated and declined, reflected in the weakening of local institutions (Pokdarwis), declining community participation, and limited ongoing government support. These findings indicate that empowerment within the program tends to be temporary and performative, oriented more toward meeting competition-based indicators than fostering long-term social transformation. From a sociological perspective, this condition reflects the commodification of empowerment, where empowerment practices are constructed as part of the program's representation rather than as a sustainable, community-driven process. Therefore, this study recommends a reorientation of program design from a competition-based model toward a sustainable facilitation approach, which emphasizes building community capacity and capabilities, as well as institutionalizing participation through strengthening local institutions.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan desa wisata dengan sekitar 1.200 desa berpotensi menjadi destinasi wisata dari total 75.000 desa yang ada. Melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan partisipasi lebih dari 500 desa wisata sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa wisata yang maju, mandiri, dan berkelanjutan sesuai target RPJMN 2020–2024. Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 6.109 desa wisata telah terdaftar dalam Jaaringan Desa Wisata. Pengembangan desa wisata juga menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Dari 121 desa yang ada, sebanyak 25 desa telah ditetapkan sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Gowa dan masuk dalam program pembinaan pemerintah daerah. Namun, mayoritas desa wisata tersebut masih berada pada kategori rintisan, sedangkan hanya empat desa yang masuk kategori berkembang, yaitu Desa Pao, Desa Manuju, Desa Biringala, dan Hutan Pinus Malino. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keberlanjutan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pasca program pemerintah.

Pengembangan desa wisata dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat desa (Ulum & Dewi 2021). Melalui berbagai program, desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang diharapkan mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan (Marsuki dkk. 2025). Salah satu program yang cukup menonjol adalah Anugerah Desa Wisata Indonesia (selanjutnya disingkat ADWI) yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini dirancang untuk mendorong desa-desa di Indonesia mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas melalui skema kompetisi yang menilai aspek daya tarik, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan (Maclure, 2023).

Secara normatif, program tersebut mengusung paradigma pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal, distribusi manfaat ekonomi yang adil, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya (Melynk dkk. 2023). Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang memperkuat kapasitas, kemandirian, dan agensi komunitas (Bernsen dkk. 2022). Namun demikian, implementasi program berbasis kompetisi seperti ADWI menyisakan sejumlah persoalan, khususnya terkait dengan keberlanjutan praktik pemberdayaan setelah program berakhir (Marsuki dkk. 2026; (Santoso, 2022).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis proyek dan kompetisi seringkali menghasilkan capaian yang bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. (Dangi & Jamal, 2016) menyatakan bahwa pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*) dan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan wisata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, keadilan, partisipasi masyarakat, tata kelola, dan pemberdayaan komunitas lokal. Pengembangan pariwisata berkelanjutan, menurut Valdés dkk. (2025), akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan *bottom-up*, yaitu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan wisata. Kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan *top-down* yang terlalu didominasi pemerintah seringkali menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi lemah, bersifat simbolik, dan tidak berkelanjutan. Ini berkebalikan dengan apa yang dinyatakan oleh Wulandari & Setiawan (2026) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata seringkali masih bersifat simbolik, yaitu masyarakat hanya dilibatkan secara formal tanpa memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.

Intensitas kegiatan yang tinggi selama masa penilaian kerap kali tidak diikuti dengan keberlanjutan program setelah kompetisi selesai (Hsu dkk. 2022). Dalam konteks ini, pemberdayaan berpotensi mengalami pergeseran makna, dari proses jangka panjang yang berorientasi pada transformasi sosial menjadi aktivitas temporer yang diarahkan untuk memenuhi indikator penilaian. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak lagi dimaknai sebagai proses substantif, melainkan sebagai bagian dari performa program yang harus ditampilkan (Apriliandra dkk. 2022).

Fenomena tersebut dapat diamati pada beberapa desa wisata di Kabupaten Gowa yang pernah berpartisipasi dalam program ADWI. Salah satu kasus yang menarik adalah Desa Wisata Manuju, yang memiliki potensi wisata alam berupa Air Terjun Bokobili dan Air Terjun Lembah Karaeng (Marsuki 2026:62). Pada fase awal keterlibatan dalam program, desa ini menunjukkan dinamika yang cukup progresif, ditandai dengan meningkatnya aktivitas pengelolaan wisata, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Namun, pasca berakhirnya program, aktivitas tersebut mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Objek wisata menjadi kurang terkelola, partisipasi masyarakat menurun, dan kelembagaan lokal tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi program yang menekankan keberlanjutan dengan realitas di lapangan yang cenderung temporer (sementara/semu).

Dalam perspektif sosiologis, fenomena ini tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan implementasi teknis, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang lebih luas terkait dengan logika program pembangunan itu sendiri (Ilyas dkk. 2025). Jika mengacu pada pemikiran Karl Marx, proses pembangunan dapat mengalami komodifikasi ketika nilai-nilai sosial, termasuk praktik pemberdayaan, direduksi menjadi nilai tukar yang diukur melalui indikator tertentu (Andriyus dkk. 2021). Dalam konteks ADWI, pemberdayaan berpotensi menjadi bagian dari representasi program yang dikemas untuk kepentingan penilaian dan legitimasi, bukan sebagai proses berkelanjutan yang berakar pada kebutuhan komunitas. Michel Foucault membantu menjelaskan bagaimana wacana “desa wisata ideal” dibentuk melalui mekanisme penilaian dan regulasi, yang pada akhirnya mengarahkan praktik lokal agar sesuai dengan standar eksternal (Firman 2021).

Dalam konteks ini, ada kesenjangan antara idealitas program pemberdayaan berbasis komunitas dengan realitas empiris di lapangan, khususnya terkait dengan keberlanjutan pasca program. Hingga saat ini, kajian mengenai desa wisata cenderung berfokus pada aspek pengembangan potensi dan keberhasilan program, sementara studi yang secara kritis mengkaji dinamika pasca program dan keberlanjutan pemberdayaan, jikapun ada, masih relatif terbatas (Ayu & Widyastuti, 2021), terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis kritis terkait dengan keberlanjutan program.

Pembahasan dalam artikel ini terbagi atas tiga bagian. Bagian *pertama* membahas tentang dinamika desa wisata pada fase program. Bagian *kedua* mendiskusikan tentang stagnasi pasca program dan melemahnya pemberdayaan. Pada bagian *ketiga* pembahasan difokuskan pada pemberdayaan dalam program desa wisata yang berbasis kompetisi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika pemberdayaan masyarakat dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di Kabupaten Gowa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial secara kontekstual, terutama terkait dengan proses, makna, dan relasi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Utami, 2020). Studi kasus difokuskan pada Desa Wisata Manuju, salah satu peserta

ADWI Tahun 2022 yang memiliki objek wisata Air Terjun Bokobili dan Air Terjun Lembah Karaeng, dan sebagai representasi desa yang mengalami dinamika perubahan sebelum, saat, dan setelah program berlangsung.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan pada tahap awal untuk memilih informan utama yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan desa wisata serta pelaksanaan program Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kriteria informan meliputi: (1) terlibat aktif dalam pengelolaan desa wisata minimal dua tahun, (2) memahami dinamika program dan pemberdayaan masyarakat, dan (3) memiliki posisi atau peran dalam kelembagaan desa wisata. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menemukan informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan awal. Teknik ini dipilih karena tidak semua aktor yang terlibat dalam praktik pemberdayaan dan pengelolaan wisata dapat diidentifikasi sejak awal penelitian. Melalui rekomendasi informan utama, saya memperoleh informan lain seperti pelaku usaha lokal dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri atas masing-masing seorang kepala desa, sekertaris desa, ketua Pokdarwis, anggota Karang Taruna, penggerak sosial, pelaku usaha (UMKM), dua orang pengelola air terjun, dan tiga orang anggota masyarakat, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 1** berikut ini.

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Status/Peran	Lama Keterlibatan	Keterangan
1.	Suhardi, SE	L	54	Kepala Desa	5 tahun	Pelaksana tugas
2.	Nasrun	L	49	Sekretaris Desa	5 tahun	Terlibat dalam koordinasi program
3.	Syarifuddin	L	43	Ketua Pokdarwis	5 tahun	Aktif sejak program ADWI
4.	M. Fajar	L	28	Anggota Karang Taruna	3 tahun	Terlibat saat program berlangsung
5.	Laima Sibali	L	36	Pengelola Air Terjun	4 tahun	Ketua
6.	Rustam	L	31	Pengelola Air Terjun	4 tahun	Bendahara
7.	Darma	P	38	Pelaku Usaha/UMKM	3 tahun	Kedai Makanan
8.	Syahrir	L	29	Penggerak Sosial	3 tahun	Komunitas Pecinta Alam
9.	Dg. Mangung	L	47	Anggota masyarakat	3 tahun	Berpengaruh dalam mobilisasi warga
10.	Indrianti	P	27	Anggota masyarakat	3 tahun	Peserta pelatihan destinasi wisata
11.	Ihwan	P	25	Anggota masyarakat	3 tahun	Peserta pelatihan destinasi wisata

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan (*field observation*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi informan terkait dinamika pemberdayaan masyarakat sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program ADWI. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi objek wisata, aktivitas masyarakat, serta pengelolaan desa wisata.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan & Huberman (2014:12-14) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, pemokus, dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni yang terkait dengan dinamika pemberdayaan masyarakat, partisipasi komunitas,

keberlanjutan kelembagaan lokal, dan kondisi desa wisata pasca program ADWI. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data guna menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran berbeda, yaitu pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha/UMKM, pengelola objek wisata, serta masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan penelitian, etika penelitian mencakup: (1) persetujuan untuk terlibat dalam penelitian yang diawali dengan penjelasan tentang, maksud, tujuan, dan manfaat penelitian; (2) persetujuan untuk direkam selama wawancara berlangsung; (3) persetujuan terkait penggunaan identitas informan, yaitu memberikan pilihan kepada informan untuk menggunakan nama asli atau nama samaran. Dalam penelitian ini, informan menyatakan persetujuan untuk dicantumkan nama aslinya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Dinamika Desa Wisata pada Fase Program**

Keterlibatan Desa Wisata Manuju dalam ADWI memicu peningkatan aktivitas pengelolaan wisata secara signifikan. Pada fase ini terjadi mobilisasi sumber daya yang intensif, baik dari masyarakat, pemerintah desa, maupun aktor eksternal. Aktivitas seperti gotong royong, penataan kawasan wisata Air Terjun Bokobili dan Air Terjun Lembah Karaeng, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata mengalami peningkatan yang cukup menonjol. Kondisi ini menandakan adanya akselerasi sosial yang dipicu oleh kehadiran program, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Pokdarwis berikut ini:

Waktu kita ditunjuk wakili Kabupaten untuk ikuti program desa wisata, masyarakat sangat semangat dan ramai terlibat. Kita gotong royong bersihkan lokasi jalan ke air terjun wisata, sama di perbaiki jalan masuk, dan semua ikut membantu karena desa mau dinilai, kita kompak sekali saat itu (Syarifuddin, Ketua Pokdarwis).

Hal ini diperkuat oleh Sekretaris Desa sebagai berikut:

Kegiatan waktu persiapan desa wisata itu memang lebih aktif dibanding sebelumnya. Banyak masyarakat ikut karena ada dorongan dari pemerintah desa menghimbau semua masyarakat dan kelompok yang ada didesa untuk mendukung ini program dan sama juga pendampingan dari dinas pariwisata apa-apa yang harus dipersiapkan (Nasrun, Sekretaris Desa).

Kondisi ini menunjukkan adanya akselerasi sosial yang dipicu oleh kehadiran program pembangunan wisata. Secara sosiologis, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif Anthony Giddens yang menekankan relasi dialektis antara struktur dan agen (Renold, 2019). Program ADWI sebagai struktur menyediakan seperangkat aturan, sumber daya, dan insentif yang mendorong masyarakat (agen) untuk bertindak. Dalam konteks ini, meningkatnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata lahir dari kesadaran kolektif yang organik, melainkan juga merupakan respons terhadap tekanan dan peluang yang diciptakan oleh struktur program. Dengan kata lain, partisipasi yang muncul berada dalam kerangka "partisipasi terstruktur" yang diarahkan oleh logika eksternal.

Tingginya partisipasi pada fase program juga dapat dilihat sebagai bentuk mobilisasi sosial yang bersifat instrumental. Jika merujuk pada Bourdieu (1986:248), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata dapat dipahami sebagai upaya akumulasi modal sosial dan simbolik, baik pada level individu maupun komunitas. Desa

berupaya membangun citra sebagai “desa wisata ideal” melalui berbagai praktik kolektif yang ditampilkan selama program berlangsung. Namun, praktik tersebut cenderung bersifat performatif, yaitu dilakukan dalam rangka memenuhi ekspektasi eksternal, bukan sepenuhnya sebagai ekspresi habitus lokal yang telah mengakar, sebagaimana dinyatakan oleh Fajar, anggota Karang Taruna, berikut ini:

Masyarakat berusaha menunjukkan kalau desa ini layak jadi desa wisata. Jadi semua berusaha aktif supaya mendapat perhatian dan penilaian bagus jadi apa yang tidak ada itu berusaha diadakan, seperti harus disediakan penginapan, maka disampaikan sama warga yang bersedia kemudian disurvei, saya sama teman-teman terlibat waktu persiapan itu (M. Fajar, anggota Karang Taruna).

Dalam kerangka ini, aktivitas sosial masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai kerja kolektif, tetapi juga sebagai strategi memperoleh legitimasi dan pengakuan simbolik dalam arena kompetisi desa wisata. Namun, praktik tersebut cenderung bersifat performatif karena lebih diarahkan untuk memenuhi ekspektasi eksternal dibanding tumbuh dari habitus lokal yang telah mengakar secara berkelanjutan.

Jika ditinjau dari perspektif kekuasaan, dinamika ini juga mencerminkan bagaimana program pembangunan membentuk pola tindakan masyarakat. Merujuk pada kerangka Foucault (1980) tentang relasi kuasa dan produksi diskursus, program Desa Wisata ini tidak hanya berfungsi sebagai program teknokratis, tetapi juga sebagai mekanisme produksi diskursus tentang “desa wisata yang ideal.” Melalui indikator dan standar penilaian, program ini secara tidak langsung mengarahkan praktik lokal agar sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Akibatnya, masyarakat terdorong untuk menyesuaikan diri dengan kriteria tersebut, sehingga muncul kecenderungan homogenisasi praktik antar desa.

Peningkatan partisipasi pada fase ini tidak sepenuhnya mencerminkan keberdayaan yang bersifat substantif. Partisipasi yang tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh momentum program, sehingga cenderung bersifat situasional dan temporer. Pada tahap awal pengembangan desa wisata, khususnya dalam rangka menyambut proses penilaian desa wisata, berbagai sarana dan prasarana pendukung dibangun, seperti papan penunjuk arah, gapura, dan berbagai elemen visual lainnya yang berfungsi memperkuat identitas serta keberadaan objek wisata. Namun, setelah proses penilaian selesai, sebagian besar fasilitas tersebut tidak dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan, salah satunya seperti yang nampak pada **Gambar 1** di bawah ini.



Gambar 1. Penunjuk arah dan gapura Air Terjun Bokobili

Dalam konteks ini, partisipasi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan, melainkan masih berada dalam kerangka respons terhadap stimulus eksternal, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola air terjun berikut ini:

Setelah itu penilaian desa wisata dan program selesai, tidak adami lagi kegiatan. Tidak seperti waktu awal sama mau penilaian, karena pendampingan juga sudah jarang. Pernah saya tanya pak Desa dulu tentang kelanjutan dari Dinas Pariwisata setelah itu tidak adami lagi. Jadi kita disini *mandirimi* kelola tahun lalu masih *dapatji* bantuan 2 gazebo (Laima Sibali, Pengelola Air Terjun).

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh momentum program dan kebutuhan kompetisi sehingga cenderung bersifat situasional dan temporer. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan, melainkan masih berada dalam kerangka respons terhadap stimulus eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika desa wisata pada fase program lebih merepresentasikan keberhasilan mobilisasi jangka pendek dibandingkan dengan proses pemberdayaan jangka panjang yang berakar pada kebutuhan dan kapasitas komunitas lokal.

- **Stagnasi Pasca Program dan Melemahnya Pemberdayaan**

Pasca berakhirnya program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), dinamika pengelolaan desa wisata di Manuju menunjukkan kecenderungan stagnasi. Aktivitas wisata yang sebelumnya intensif mengalami penurunan, ditandai dengan berkurangnya kegiatan kolektif masyarakat, menurunnya tingkat kunjungan, serta melemahnya pemeliharaan fasilitas wisata. Selain itu, kelembagaan lokal seperti Pokdarwis tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak pengelolaan wisata desa, seperti dinyatakan oleh Pak Laima Sibali, pengelola air terjun, bahwa: "Setelah selesai program, kegiatan mulai berkurang. Tidak seperti dulu waktu masih ada pendampingan dan penilaian. Sekarang masyarakat juga sudah jarang ikut gotong royong."

Secara sosiologis, kondisi ini dapat dipahami melalui perspektif strukturasi Anthony Giddens (1984:25), bahwa struktur tidak hanya membatasi tindakan sosial, tetapi juga menyediakan sumber daya dan aturan yang memungkinkan agen bertindak. Hal ini menekankan pentingnya keberlanjutan relasi antara struktur dan agen. Pada fase program, struktur menyediakan dukungan berupa sumber daya, regulasi, dan legitimasi yang mendorong tindakan kolektif masyarakat. Namun, ketika struktur tersebut melemah atau tidak lagi hadir secara aktif pasca program, maka praktik sosial yang sebelumnya terbentuk tidak memiliki cukup daya reproduksi. Akibatnya, tindakan kolektif yang semula intensif menjadi tidak berkelanjutan karena tidak tertopang oleh sistem yang stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang terjadi belum mencapai tahap institusionalisasi. Dalam kerangka Bourdieu, praktik pengelolaan wisata belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi habitus kolektif masyarakat. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara intensif selama program belum bertransformasi menjadi kebiasaan sosial yang mengakar ini menjelaskan praktik sosial yang terbentuk belum mampu direproduksi secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Bourdieu 1990:52). Pada kasus Desa Wisata Manuju, aktivitas pengelolaan wisata yang berkembang selama program berlangsung belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kebiasaan kolektif masyarakat. Ketika stimulus eksternal menghilang, praktik-praktik tersebut ikut melemah karena belum memiliki basis kultural yang kuat.

Stagnasi pasca program juga sebagai konsekuensi dari lemahnya dimensi kapabilitas dalam pemberdayaan. Jika mengacu pada pemikiran Amartya Sen (1999:75) tentang *capability approach*, pemberdayaan seharusnya berorientasi pada perluasan kemampuan nyata masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Namun,

pemberdayaan yang terjadi lebih bersifat fasilitatif jangka pendek dan belum secara efektif meningkatkan kapasitas internal komunitas. Akibatnya, masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melanjutkan pengelolaan wisata secara mandiri setelah program berakhir. Dalam kaitan dengan ini, Darma, mengungkapkan, bahwa :

Pelatihan memang pernah ada sebelum penilaian kita diajari bagaimana itu budaya wisata keramahtamahan dan pembuatan oleh-oleh khas makanan lokal yang ada disini, tapi setelah itu tidak ada lagi pendampingan lanjutan. Jadi masyarakat masih bingung bagaimana melanjutkan wisata sendiri sama kita berjualan disini juga *paccemi* karena kurangmi kesini orang (Darma, Pelaku UMKM).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketergantungan pada intervensi eksternal. Dalam perspektif Foucault (1980:93) terkait pembentukan subjek melalui pengetahuan dan kekuasaan, program pembangunan seringkali membentuk pola relasi kuasa yang menempatkan masyarakat sebagai penerima intervensi, bukan sebagai subjek yang otonom. Ketika intervensi tersebut dihentikan, maka ruang praktik sosial yang sebelumnya terbentuk ikut melemah karena tidak disertai dengan transfer kuasa memadai kepada komunitas lokal. Syarifuddin, misalnya, menjelaskan, bahwa:

Inimi juga tantangannya kalau tidak adami lagi program sama dukungan dari kabupaten, masyarakat juga mulai kurang bergerak karena merasa tidak ada yang mengarahkan, saya di Pokdarwis *seringji* koordinasi sama Pak Desa dulu sama pak Camat ini bagaimana kelanjutannya karena kondisi juga di Pokdarwis ini terbatas dan teman-teman semua kemana-manami (Syarifuddin, Ketua Pokdarwis Manuju).

Stagnasi pasca program tidak semata-mata menunjukkan persoalan teknis dalam pengelolaan desa wisata, tetapi mencerminkan lemahnya keberlanjutan proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang diharapkan menjadi proses transformasi jangka panjang justru tidak berkelanjutan karena tidak diiringi dengan penguatan kapasitas, institusionalisasi praktik, dan kemandirian komunitas. Akibatnya, masyarakat cenderung kembali pada pola aktivitas sebelumnya setelah program berakhir, sehingga tujuan pembangunan desa wisata berbasis pemberdayaan tidak tercapai.



Gambar 2. Gerai UMKM

Gerai UMKM pada awalnya dirancang sebagai wadah bagi para pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk unggulan desa sekaligus menampilkan berbagai hasil kerajinan, kuliner, dan produk khas yang dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian desa wisata. Keberadaan gerai tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan akses pasar bagi pelaku UMKM. Namun, kondisi saat ini menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan. Gerai tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola secara optimal hingga lapuk dimakan waktu (lihat **Gambar 2** di atas). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga memerlukan penguatan

kelembagaan, pendampingan usaha dan pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan.

Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan dalam program ADWI cenderung bersifat temporer. Aktivitas seperti pelatihan, pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat berlangsung intensif pada saat program berjalan, namun tidak menunjukkan keberlanjutan setelah program berakhir. Kondisi ini menandakan bahwa pemberdayaan lebih hadir sebagai respon terhadap momentum program, bukan sebagai proses yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Partisipasi yang terbentuk lebih banyak didorong oleh adanya stimulus eksternal berupa program dan proses penilaian, daripada tumbuh dari kesadaran kolektif dan kebutuhan internal komunitas untuk mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program selama fase pelaksanaan belum secara otomatis menghasilkan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata. Berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan yang diberikan lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan program dalam jangka pendek, sementara proses penguatan kemampuan masyarakat untuk mengelola wisata secara mandiri belum berkembang secara optimal. Akibatnya, ketika dukungan program dihentikan, aktivitas kolektif masyarakat juga mengalami penurunan yang signifikan. Menurut Amartya Sen, pemberdayaan sejatinya berkaitan dengan perluasan kemampuan nyata (*capabilities*) individu dan komunitas untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri (Sen 1999:75). Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas atau meningkatnya partisipasi sesaat, tetapi dari sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan capaian tersebut tanpa ketergantungan pada intervensi pihak eksternal.

Sifat temporer pemberdayaan juga menunjukkan belum terjadinya proses internalisasi nilai dan praktik sosial ke dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas pengelolaan wisata yang berkembang selama program berlangsung belum bertransformasi menjadi kebiasaan sosial yang direproduksi secara berkelanjutan oleh komunitas. Akibatnya, berbagai praktik yang sebelumnya tampak aktif selama fase program perlahan mengalami penurunan ketika stimulus eksternal tidak lagi tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masih berada pada tahap mobilisasi partisipasi, belum mencapai tahap institusionalisasi yang memungkinkan praktik-praktik tersebut bertahan dalam jangka panjang. Suhardi, PLT Kepala Desa, mengungkapkan, bahwa:

Dulu aktif itu di air terjun masyarakat semangat karena ada dukungan program desa wisata dari pusat. Setelah berakhir, kegiatan juga ikut berakhir-*mi*. saya pernah koordinasi sama Dinas Pariwisata bagaimana ini dan waktu Musrenbang Desa karena kondisi di air terjun itu semakin memprihantinkan. Padahal dana desa itu peruntukannya untuk kemajuan desa ini, tapi terbengkalaimi nanti kita coba pikirkan bagaimana jalan baiknya (Suhardi, PIT Kepala Desa).

Pemberdayaan yang bersifat temporer menunjukkan bahwa proses yang terjadi belum mencapai tahap kemandirian sosial. Pemberdayaan masih berada dalam tahap mobilisasi jangka pendek yang bergantung pada intervensi eksternal, bukan pada kesadaran kolektif dan kapasitas internal komunitas. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur hanya dari intensitas kegiatan selama pelaksanaan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana praktik pemberdayaan mampu bertahan dan direproduksi secara mandiri oleh masyarakat secara berkelanjutan.

- **Pemberdayaan Berbasis Kompetisi**

Temuan krusial dalam penelitian ini adalah terjadinya rekonstruksi pemberdayaan. Pemberdayaan tidak lagi semata dipahami sebagai proses transformasi sosial, tetapi

telah bergeser menjadi bagian dari representasi program yang dikonstruksi untuk memenuhi kebutuhan penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial seperti partisipasi dan gotong royong mengalami reduksi menjadi nilai tukar, yang diukur melalui indikator program (Tabroni dkk. 2023). Aktivitas masyarakat tidak sepenuhnya didorong oleh kesadaran kolektif, melainkan oleh kebutuhan untuk “menampilkan” keberdayaan. Dalam konteks ini, aktivitas pemberdayaan lebih banyak diarahkan pada pencitraan desa wisata yang aktif, partisipatif, dan layak dinilai dibanding membangun fondasi sosial yang berkelanjutan dalam komunitas. Dalam kaitan dengan ini, Syarifuddin mengungkapkan, bahwa:

Kalau mau penilaian, semua bergerak. Kita masyarakat dikumpulkan diajak aktif terlibat supaya desa kelihatan siap dan bagus di mata tim penilai utamanya Dinas Pariwisata. Sebetulnya di situ problemnya karena seharusnya ini bisa berlanjut di anggaran, bisa setiap tahun diperhatikan biar sedikit, jadi teman-teman juga bisa pertanggungjawabkan. Tapi, begitu selesai kita tidak wakili Gowa ke Provinsi kembali seperti biasa lagi (Syarifuddin, Ketua Pokdarwis).

Fenomena tersebut tampak dari bagaimana berbagai aktivitas masyarakat mengalami intensifikasi selama fase program berlangsung. Kegiatan gotong royong, pelatihan, penataan kawasan wisata, hingga keterlibatan masyarakat dalam promosi desa wisata dilakukan secara masif menjelang proses penilaian program.

Program ini juga membentuk wacana tentang “desa wisata ideal” yang harus diikuti oleh masyarakat. Standar dan indikator yang ditetapkan mendorong desa untuk menyesuaikan diri, sehingga praktik lokal cenderung mengikuti logika eksternal. Secara sosiologis, temuan ini menegaskan bahwa program pembangunan berbasis kompetisi berpotensi menghasilkan pemberdayaan yang bersifat simbolik dan temporer. Pemberdayaan tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami pergeseran makna dari proses transformasi sosial menjadi performa program. Salah seorang penggerak sosial menyatakan, bahwa:

Semua desa wisata itu seperti berlomba menunjukkan hal yang sama supaya dianggap memenuhi standar dari Kementerian. Setelah itu kembali lagi karena orientasinya sertifikat sama predikat pernah mengikuti kompetisi pusat. Padahal kan ini masyarakat dibantu untuk memikirkan potensi dari desanya biar perputaran ekonomi *baguski* dan bertambah pendapatannya warga (Syahrir, Penggerak Sosial/PAL Manuju).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis kompetisi secara tidak langsung membentuk mekanisme normalisasi sosial, desa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan model yang dianggap ideal oleh institusi eksternal.

Selain itu, pemberdayaan berbasis kompetisi juga terlihat dari sifat partisipasi masyarakat yang cenderung temporer dan performatif. Aktivitas kolektif masyarakat meningkat secara signifikan selama program berlangsung, namun mengalami penurunan setelah program selesai dan perhatian pemerintah mulai berkurang. Dalam kaitan dengan ini, Nasrun, Sekretaris Desa Manuju, mengemukakan bahwa:

Waktu ada program masyarakat aktif sekali, tapi setelah selesai kegiatan mulai berkurang karena sudah bukan fokusnya di sana. Tidak ada lagi yang mau lanjutkan yang sudah diberikan mungkin karena butuh ada yang mendampingi lagi (Nasrun, Sekretaris Desa Manuju).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang terjadi belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi kesadaran kolektif dan habitus sosial masyarakat. Jika merujuk pada pemikiran Bourdieu (1977:72), praktik sosial akan bertahan apabila telah menjadi bagian dari disposisi sosial yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun, dalam konteks ini, praktik pemberdayaan adalah praktik pencitraan agar mendapatkan nilai yang bagus berdasarkan indikator kompetisi.

Firman (2021) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dapat meningkatkan kapasitas sosial masyarakat apabila didukung oleh partisipasi aktif, kepemimpinan lokal, dan penguatan kelembagaan komunitas. Partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokal merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Namun demikian, partisipasi yang terbentuk dalam konteks ADWI tidak berkembang menjadi pemberdayaan yang berkelanjutan karena lebih dipengaruhi oleh tuntutan program dan kebutuhan kompetisi dibandingkan kebutuhan internal komunitas.

Namun, temuan Santoso (2022) menunjukkan hal yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Kelurahan Kandri, Kota Semarang. Program desa wisata justru mampu mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penguatan kelompok masyarakat, dan pengembangan aktivitas ekonomi berbasis wisata. Peningkatan kapasitas yang terjadi selama pelaksanaan program ADWI cenderung bersifat sementara karena tidak diikuti mekanisme pendampingan berkelanjutan setelah program berakhir. Akibatnya, kapasitas yang telah dibangun tidak sepenuhnya berkembang menjadi kemampuan kolektif yang mampu menopang keberlanjutan desa wisata secara mandiri.

Studi Ulum & Dewi (2021) tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gampong menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengembangan desa wisata. Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat dalam kegiatan operasional wisata, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa partisipasi merupakan elemen penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Namun, dalam konteks ADWI, tingginya partisipasi masyarakat selama pelaksanaan ADWI tidak berkelindan dengan keberdayaan yang substantif. Partisipasi yang muncul lebih banyak bersifat instrumental dan situasional, sehingga mengalami penurunan ketika program berakhir.

Program pembangunan berbasis kompetisi berpotensi menghasilkan pemberdayaan yang bersifat simbolik dan temporer. Pemberdayaan tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami pergeseran makna dari proses transformasi sosial menjadi performa program. Artinya, pemberdayaan dalam konteks program ADWI cenderung mengalami komodifikasi, sehingga keberlanjutannya menjadi lemah dan tidak mampu membangun kemandirian komunitas secara substantif. Implikasinya, keberlanjutan pemberdayaan tidak didukung oleh internalisasi nilai, penguatan kapasitas, dan institusionalisasi praktik dalam masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya menghambat terciptanya kemandirian komunitas secara berkelanjutan dan menempatkan desa wisata dalam siklus mobilisasi jangka pendek yang terus bergantung pada intervensi eksternal.

Temuan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian sosiologi pembangunan dan pariwisata berbasis masyarakat melalui integrasi teori strukturasi Anthony Giddens, konsep habitus dan modal sosial Pierre Bourdieu, teori relasi kuasa dan diskursus Michel Foucault, serta *capability approach* Amartya Sen dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Jika merujuk pada Giddens, maka seyogyanya program ADWI membentuk sekaligus membatasi praktik sosial masyarakat melalui seperangkat aturan dan sumber daya yang tersedia. Konsep habitus dan modal sosial Bourdieu menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh disposisi sosial dan kapasitas kolektif komunitas dalam mereproduksi tindakan secara berkelanjutan. Dari sisi Foucault mengindikasikan bahwa standar dan indikator program membentuk diskursus mengenai desa wisata ideal yang pada akhirnya mengarahkan perilaku aktor lokal pada pencapaian target-target administratif. Pendekatan kapabilitas Amartya Sen menegaskan bahwa pemberdayaan

hanya akan bermakna apabila mampu meningkatkan kemampuan nyata masyarakat untuk memilih, mengelola, dan mengembangkan potensi desanya secara mandiri.

Melalui sintesis keempat perspektif tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kompetisi terjadi ketika struktur program yang bersifat kompetitif lebih dominan dibandingkan proses penguatan kapabilitas komunitas. Akibatnya, pemberdayaan direduksi menjadi instrumen pencapaian prestasi dan legitimasi program, bukan sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

Ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang berkelanjutan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dipersiapkan untuk menjadi mandiri, sehingga ada atau tidak ada program dari luar, pemberdayaan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Kompetisi menjadi stimulator pemberdayaan untuk menunjukkan performa mereka, bukan menjadi pokok pemberdayaan itu sendiri karena ada atau tidaknya kompetisi mereka tetap bergerak.

Artinya, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh penyediaan infrastruktur, tetapi terutama oleh kemampuan membangun kelembagaan lokal yang kuat, partisipasi masyarakat yang substantif, serta proses pemberdayaan yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial komunitas.

4. Penutup

Implementasi program ADWI di Kabupaten Gowa menghadirkan dinamika yang paradoksal. Di satu sisi, program mampu mendorong mobilisasi sosial dan meningkatkan aktivitas pengelolaan desa wisata dalam jangka pendek. Di sisi lain, keberlanjutan praktik pemberdayaan tidak terjaga, sehingga pasca program berakhir terjadi stagnasi yang ditandai dengan melemahnya partisipasi masyarakat, fungsi kelembagaan, serta pengelolaan objek wisata.

Secara sosiologis, kondisi ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang dihasilkan cenderung bersifat temporer dan simbolik, bahkan mengalami pergeseran menjadi bagian dari performa program. Pemberdayaan tidak sepenuhnya hilang, tetapi terjebak dalam logika pencitraan yang mengutamakan pencapaian indikator dibanding transformasi sosial yang berkelanjutan. Akibatnya, desa wisata tidak berkembang sebagai ruang kemandirian komunitas, melainkan sebagai entitas yang bergantung pada intervensi eksternal.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya strategis untuk mengurai persoalan keberlanjutan pemberdayaan dalam pengembangan desa wisata. *Pertama*, reorientasi desain program dari model berbasis kompetisi menuju model pendampingan berkelanjutan. Program tidak seharusnya berhenti pada fase penilaian, tetapi dilanjutkan dengan mekanisme pembinaan jangka panjang yang memastikan keberlanjutan praktik di tingkat lokal. *Kedua*, penguatan kapasitas dan kapabilitas komunitas perlu menjadi fokus utama. Pemberdayaan harus diarahkan pada peningkatan kemampuan nyata masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara mandiri, bukan sekadar memenuhi indikator administratif. Hal ini mencakup penguatan manajemen kelembagaan lokal, pengembangan kewirausahaan berbasis wisata, serta peningkatan literasi pariwisata masyarakat. *Ketiga*, institusionalisasi partisipasi masyarakat melalui penguatan peran kelembagaan seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Kelembagaan lokal perlu didorong menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar pelaksana program. Dengan demikian, praktik pemberdayaan dapat terinternalisasi dan direproduksi secara berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian, upaya mengurai persoalan pemberdayaan berbasis kompetisi tidak cukup dilakukan melalui kritik terhadap program, tetapi harus diikuti dengan rekonstruksi pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Dengan cara demikian, desa wisata dapat berkembang tidak sekadar

sebagai objek program, tetapi sebagai ruang transformasi sosial yang memperkuat kemandirian dan kesejahteraan komunitas lokal.

Acknowledgement

Terima kasih kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah menyediakan waktu untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait dan bersedia untuk dipublikasikan pada artikel ini.

Conflicts of Interest

Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). "Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1):63–74, <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3660>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). "Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1):27-39, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37538>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Ayu, D., & Widyastuti, R. (2021). "Komodifikasi Upacara Religi Dalam Pemasaran Pariwisata." *Jurnal Komunikasi*, 1:197–208. <https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/18>, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Bernsen, N. R., Crandall, M. S., Leahy, J. E., Abrams, J. B., & Colocousis, C. R. (2022). "Do Rural Youth Want to Stay Rural? Influences on Residential Aspirations of Youth in Forest-located Communities." *Community Development*, 53(5):566–584, https://www.researchgate.net/publication/359387504_Do_rural_youth_want_to_stay_rural_Influences_on_residential_aspirations_of_youth_in_forest-located_communities, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). "An Integrated Approach to 'Sustainable Community-Based Tourism'." *Sustainability Journal*, 8(5):1-32, https://www.researchgate.net/publication/303093342_An_Integrated_Approach_to_Sustainable_Community-Based_Tourism, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Firman, A. A. (2021). "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Berbasis Komunitas." *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1):1–15, <https://ejurnalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/196>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Hsu, Y. C., Huang, T. H., 'Kenneth,' Verma, H., Mauri, A., Nourbakhsh, I., & Bozzon, A. (2022). "Empowering local communities using artificial intelligence." *Patterns*, 3(3), <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9058901/>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Ilyas, M., Malik, I., & Aryati, R. A. (2025). "Partisipasi Komunitas dalam Mengelola Komodifikasi Budaya." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8:3883–3887, <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7613> diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Maclure, L. (2023). "Augmentations to the Asset-based Community Development Model to Target Power Systems." *Community Development*, 54(1):4–17, https://www.researchgate.net/publication/358100673_Augmentations_to_the_asset-based_community_development_model_to_target_power_systems, diakses tanggal 3 Mei 2026.

- Marsuki, N. R. (2026). Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas. Sidoarjo : Inti Litera, 62-65, <https://media.neliti.com/media/publications/702146-membangun-desa-wisata-berbasis-komunitas-dbce8f2c.pdf>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Marsuki, N. R., Manda, D., & Najamuddin. (2025). "Constructing Sustainable Community-Based Tourism: Institutional Challenges and Local Empowerment in Gowa Regency, Indonesia." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. https://www.researchgate.net/publication/390927182_Constructing_Sustainable_Community-Based_Tourism_Institutional_Challenges_and_Local_Empowerment_in_Gowa_Regency_Indonesia, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Marsuki, N. R., Nursida, A., & Memunah. (2026). "Community Empowerment Model Through Integrative Social Capacitation in the Development of Bissoloro Tourism Village , Gowa Regency. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(2): 448-457, <https://journal.privietlab.org/index.php/PSSJ/article/view/1537>, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Mappasere, S. A, & Suyuti, N. (2019). "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." https://www.researchgate.net/profile/Ismaile-Wekke/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial/links/5f5c132ea6fdcc11640bd740/Metode-Penelitian-Sosial.pdf#page=42, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Melnyk, A., Cox, H., Ghorbani, A., & Hoppe, T. (2023). "Value Dynamics in Energy Democracy: An Exploration of community Energy Initiatives." *Energy Research and Social Science*, 102(103163):1-14, https://www.researchgate.net/publication/371378189_Value_dynamics_in_ener_gy_democracy_An_exploration_of_community_energy_initiatives, diakses tanggal 2 Mei 2026
- Renold, R. (2019). "Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Bissoloro Kabupaten Gowa. *PUSAKA:Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1):18–28, <https://media.neliti.com/media/publications/301818-strategi-pengembangan-potensi-wisata-des-1e9eb649.pdf>, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/> , diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Santoso, A. A.P. (2022). "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah." *J-3P: Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 7:33–48, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2930>, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Tabroni, R., Muhtadi, A. S., & Mukarom, Z. (2023). "Komodifikasi Filantropi Keagamaan di Harian Umum Republika." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 2089-8835, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/view/25081/8836>, diakses tanggal 3 Mei 2026.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1):14–24, <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4527>, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Utami, V. Y. (2020). "Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma." *Reformasi*, 10(1):34–44, https://www.researchgate.net/publication/347619713_DINAMIKA_MODAL_SO_SIAL_DALAM_PEMBERDAYAAN_MASYARAKAT_PADA_DESA_WISATA_HA_LAL_SETANGGOR_KEPERCAYAAN_JARINGAN_SOSIAL_DAN_NORMA, diakses tanggal 2 Mei 2026.
- Valdés, H., Cairo, R., Leon, I., Oblitas, G., & Isabel, A. (2025). "Approaches to Sustainable Tourism Development Associated With Community Empowerment: Systematic Literature Review." *Revista Venezolana de Gerencia*, 30(112):1979-

1998,

https://www.researchgate.net/publication/396242095_Approaches_to_sustainable_tourism_development_associated_with_community_empowerment_Systematic_literature_review, diakses tanggal 3 Mei 2026.

Wulandari, L., & Setiawan, A. (2026). "From Symbolic Participation to Substantive Empowerment in Community-Based Tourism Development." *Qriset Indonesia Journal of Tourism*, 1(1), 26–33, <https://ejournal.grisetindonesia.com/qijt/article/view/107>, diakses tanggal 3 Mei 2026.